



**PENGARUH *INTERGOVERNMENTAL REVENUE*, PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA / KABUPATEN DI JAWA TIMUR**

Proposal Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh

Ryansyah Ilham Sasti

NPM. 21801082016



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

MALANG

2022



ABSTRAK

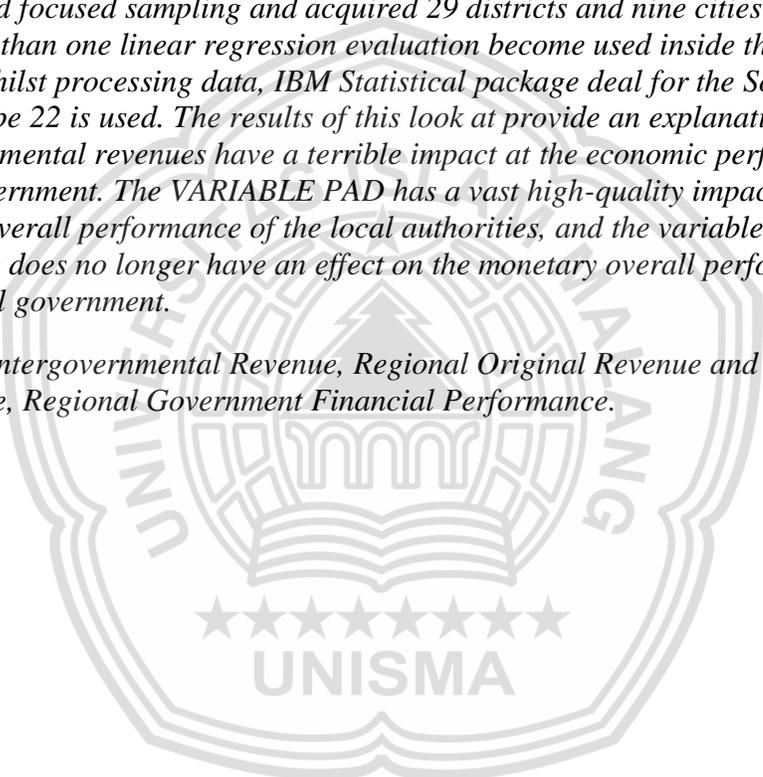
Kinerja pemerintah daerah merupakan ukuran keberhasilan pemerintah daerah sekitarnya dalam mengelola sumber daya yang berasal dari daerahnya atau otoritas penting. Kontrol secara mandiri dan kolaboratif memberikan penyedia luar biasa ke jaringan. Motif penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *Intergovernmental Revenue*, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2017-2020. Penelitian ini menggunakan metode asosiatif dengan metode kuantitatif. Statistik yang digunakan adalah informasi sekunder dengan koleksi waktu 4 tahun. publik menggunakan Catatan Audit (LHP) yang diterima dari kerangka Audit yang sempurna. Metode pengambilan sampel menggunakan *focus* sampling dan diperoleh 29 kabupaten dan 9 kota di Jawa Timur. lebih dari satu evaluasi regresi linier digunakan dalam analisis catatan. saat memproses data, kesepakatan paket Statistik IBM untuk Ilmu Sosial tipe 22 digunakan. Hasil tinjauan ini memberikan penjelasan bahwa pendapatan antar pemerintah berdampak buruk terhadap kinerja ekonomi pemerintah di sekitarnya. VARIABEL PAD memiliki dampak kualitas tinggi yang luas terhadap kinerja ekonomi pemerintah daerah secara keseluruhan, dan variabel belanja modal tidak lagi berpengaruh pada kinerja moneter pemerintah daerah secara keseluruhan.

Kata Kunci : *Intergovernmental Revenur, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Belanja Modal , Kinerja keuangan.*

ABSTRACT

The monetary performance of local governments is a measure of the success of nearby government in managing resources coming from their areas or important authorities. control independently and collaboratively gives extraordinary provider to the network. The motive of this look at turned into to decide the effect of intergovernmental sales, local seed sales (PAD) and capital expenses on the monetary performance of the regency/town authorities in East Java in 2017-2020. This study used an associative method with a quantitative method. The statistics used are secondary information with a time collection of 4 years. the public uses the Audit record (LHP) received from the perfect Audit frame. The sampling method used focused sampling and acquired 29 districts and nine cities in East Java. more than one linear regression evaluation become used inside the records analysis. whilst processing data, IBM Statistical package deal for the Social Sciences type 22 is used. The results of this look at provide an explanation for that intergovernmental revenues have a terrible impact at the economic performance of nearby government. The VARIABLE PAD has a vast high-quality impact on the economic overall performance of the local authorities, and the variable capital expenditure does no longer have an effect on the monetary overall performance of the regional government.

Keyword: *Intergovernmental Revenue, Regional Original Revenue and Capital Expenditure, Regional Government Financial Performance.*



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Periode krisis keuangan pada era menuju reformasi telah mempengaruhi kondisi dan sistem perekonomian di Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan pemerintah untuk segera melakukan reformasi di segala bidang. Perubahan sistem pengelolaan keuangan dengan memberikan kewenangan penuh setiap daerah dalam mengelola keuangannya. Hal tersebut merubah alur dimana pemerintah pusat memberikan wewenang pengelolaan keuangan kepada pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah mampu secara mandiri membiayai pembangunan dan pelayanan atas dasar keuangan sendiri. Disisi lain keleluasaan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya juga akan memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada kepuasan masyarakat sehingga rakyat bisa menilai kinerja pemerintah daerah semakin besar dan kritis.

Pergeseran sistem pemerintahan dari sentralisasi menuju sistem pemerintahan desentralisasi telah berdampak pada tujuan agar daerah-daerah lebih mudah dalam mempercepat tingkat kesejahteraan masyarakat melalui tingkat pelayanan kepada masyarakat. Penerapan adanya otonomi daerah akan membuat partisipasi masyarakat dapat tersalurkan dan untuk menciptakan pemerintah daerah yang lebih unggul dan terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain sistem pemerintahan

daerah, pemerintah sudah melakukan perubahan UU No. 25 Tahun 1999 mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi UU No. 33 Tahun 2004. Peran Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam menilai pengelolaan keuangan pemerintah daerah sangat di butuhkan supaya tidak terjadi pelanggaran hukum seperti korupsi dan pelanggaran yang lain di indonesia. Laporan hasil pemeriksaan yang merupakan output dari BPK yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan secara ringkas dan jelas.

Era Otonomi Daerah seperti sekarang ini, dalam mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*), Pemerintah melakukan upaya, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Adanya otonomi daerah, maka pemerintah daerah melakukan pengelolaan keuangannya sendiri. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah telah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Pasal 4 No. 105 Tahun 2000 yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan atas keadilan dan kepatuhan.

Pemerintah pusat mendelegasikan wewenang kepada Pemerintah Daerah disertai dengan penyerahan tanggungjawab pendanaan. Pendanaan pemerintah daerah terbagi terbagi menjadi dua cara, yaitu memanfaatkan potensi daerah (sumber internal) dan dana transfer dari keuangan pusat-daerah dan antar daerah (sumber eksternal).

Undang Undang No. 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 6 yaitu pengertian tentang otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga terjadi pergeseran sistem pemerintahan sentralisasi menuju sistem pemerintahan desentralisasi. Sistem ini bertujuan agar daerah daerah lebih mudah mempercepat tingkat kesejahteraan masyarakat melalui tingkat pelayanan kepada masyarakat sehingga bisa mengedepankan kemandirian kepada Pemerintah daerah. Sehingga dengan adanya otonomi daerah partisipasi masyarakat dapat tersalurkan dan terwujud sehingga pemerintah daerah lebih unggul dan terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain sistem pemerintahan daerah, pemerintah sudah melakukan perubahan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sehubungan dengan di tetapkannya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Peran Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam menilai pengelolaan keuangan pemerintah daerah sangat di butuhkan supaya tidak terjadi pelanggaran hukum seperti korupsi dan pelanggaran yang lain di indonesia. Laporan hasil pemeriksaan yang merupakan output dari BPK yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan secara ringkas dan jelas

Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Semester (IHPS) II Tahun 2018 di susun untuk memenuhi ketentuan pasal Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004.

Ikhtisar ini merupakan ringkasan dari 496 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang di selesaikan BPK Pada semester II tahun 2018 yang terdiri atas 2 LPH keuangan (LHP) kinerja (49,2%) dan 250 LHP dengan tujuan tertentu (DDT) (50,4%).

Secara lebih terperinci BPK mengungkapkan 4.376 temuan yang memuat 6.760 permasalahan. Meliputi 1.203 (20%) permasalahan kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan 2.161(35%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan senilai Rp.4,79 Triliun, serta 2,712(45%) permasalahan ketidak hematn, ketidak efisiensi serta ketidak efektifan senilai Rp 1,50 Triliun perincian rekapitulasi, hasil pemeriksaan BPK.

Pemerintah sendiri telah melakukan upaya pengelolaan belanja yang berkualitas. Namun demikian hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pengelolaan belanja pemerintah pusat kurang efektif. Salah satu faktornya adalah peningkatan kualitas belanja tidak mencapai target yang telah di tetapkan dalam PPJMN 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Target yang ditetapkan dalam RPJMN yang di sesuaikan dalam RKP tidak tercapai yang meliputi target perubahan komposisi belanja modal dan subsidi energi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) target pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan dan target rasio APBD Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Jawa Timur mendapatkan sorotan dari DPD RI yaitu dalam tata kelola keuanan pemerintah daerah. Jumlah daerah yang mendapat penilaian wajar

dengan penecualian meningkat. Hal itu di nilai sebagai kejadian luar biasa di tengah upaya pemerintah pusat memperbaiki kinerja pemerintah daerah. Selain itu, penurunan penilaian laporan keuangan menjadi ironi di tengah upaya dalam memberantas korupsi. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jatim menyebutkan, ada tiga kabupaten dan kota dari 38 daerah jatim yang menerima opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yakni Kabupaten Jember, Kabupaten Tuluangung, dan Kota Pasuruan. Jumlah tersebut naik di dibandingkan dengan sebelumnya yang hanya dua daerah, yakni Kabupaten Sampang dan Kabupaten Lumajang. Terdapat temuan-temuan yang menjadi permasalahan tersebut. Juga di lakukan pendampingan dan pelatihan agar laporan keuangannya sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, memiliki kecukupan informasi laporan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap perundangan. Dengan mengetahui penyebab dari permasalahan tersebut, DPD bisa berperan dalam merekomendasikan perbaikan tata kelola keuangan daerah pada masa yang akan datang. (jatim.bpk.go.id/ diakses pada 13 Maret 2022)

Pemerintah daerah di tuntutan untuk mengelola keuangan daerah secara mandiri dengan perangkat APBD. Pemerintah daerah menggunakan APBD sebagai rencana kerja tahunan yang di gunakan untuk merancang, menetapkan kebijakan daerah serta mengoptimalkan pelayanan dan kesejahteraan rakyat.

Intergovernmental Revenue atau juga di sebut dengan dana perimbangan merupakan sokongan dana yang berasal dari pemerintah pusat

kepada pemerintah daerah sebagai dana untuk program program pemerintah daerah. Yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (Pajak dan Sumber Daya Alam), Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai dana untuk membatu program program yang di lakukan oleh pemerintah daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan dana dari hasil kemandirian daerah itu sendiri yaitu yang berasal dari retribusi daerah, pajak daerah, pengelolaan kekayaan daerah. Apabila PAD mengalami peningkatan pemerintah daerah mempunyai jumlah kas yang cukup, sehingga mampu membiayai program program yang sudah di rencanakan.

Menurut PP No. 71 Tahun 2010, belanja merupakan pengeluaran negara atau daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahunan anggaran bersangkutan yang tidak akan di peroleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Sedangkan modal atau ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan ekuitas. Jadi Belanja Modal dapat di artikan alokasi uang yang di rencanakan untuk memperoleh aset tetap yang memiliki masa manfaat ekonomi lebih dari satu periode akuntansi seperti properti, pabrik, dan peralatan, tanah, gedung. Variabel ini Diukur dari besarnya target alokasi belanja kabupaten/kota setiap tahun anggaran.

Hasil penelitian dari peneliti sebelumnya terdapat inkonsistensi antara penelitian yang satu dengan yang lainnya. Penelitian tentang *Intergovernmental Revenue* yang di lakukan oleh (Mulyani and Wibowo

2017) menyatakan bahwa *Intergovernmental Revenue* berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan penelitian yang di lakukan oleh (Erawati dan Masdiantini, 2016) menyatakan bahwa *Intergovernmental Revenue* tidak berpengaruh pada kinerja keuangan.

Penelitian mengenai Pendapatan Asli Daerah yang di lakukan oleh (Antari dan Sadana 2018) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Sedangkan yang di lakukn oleh (Ernawati dan Masdiantini 2016) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian mengenai Belanja Modal yang di lakukan oleh (Andirfa, at all 2016) menyatakan bahwa Belanja Modal secara parsial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Sedangkan penelitian yang di lakukan oleh (Antari and Sadana 2018) menyatakan bahwa Belanja Modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah

Ada beberapa perbedaan antara peneliti yang satu dengan yang lainnya. Peneliti terdahulu sering menggunakan variabel *Intergovernmental Revenue* dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dan jarang yang membahas mengenai Belanja Modal maka di sini menambahkan Belanja Modal untuk lebih menekankan bagi Kinerja Keuangan Daerah Kota/Kabupaten.

Penelitian ini di harapkan supaya dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan keuangan pemerintah daerah di masa yang akan datang yang bersangkutan dengan kinerja keuangan pemerintah

daerah yang dilihat dengan efisiensi anggaran. Oleh sebab itu, peneliti ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris tentang **Pengaruh *Intergovernmental Revenue* Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota/Kabupaten Di Jawa Timur Tahun 2017-2020.**

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah di jelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah *Intergovernmental revenue*, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan Daerah Kota/Kabupaten di Jawa Timur tahun 2017-2020?
2. Apakah *Intergovernmental Revenue* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kota/Kabupaten di Jawa Timur 2017-2020 ?
3. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah Kota/Kabupaten di Jawa Timur 2017-2020?
4. Apakah Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kota/Kabupaten di Jawa Timur 2017-2020?

1.3 Tujuan dan Manfaat penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh *intergovernmental revenue* ,pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan daerah Kota/Kabupaten di Jawa Timur tahun 2017-2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Intergovernmental Revenue* terhadap kinerja keuangan daerah Kota/Kabupaten di Jawa Timur tahun 2017-2020.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten di Jawa Timur tahun 2017-2020.
4. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kota/Kabupaten di Jawa Timur tahun 2017-2020.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya dapat di jadikan sumber referensi dan bahan kajian yang berkaitan tentang variabel *Intergovernmental revenue*, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal. Dan pengembangan teory agency di sektor publik terkait kinerja pemerintah daerah.

b. Bidang Keilmuan

Bagi bidang ilmu Akuntansi dapat dijadikan sumber referensi yang berkenaan Akuntansi Sektor Publik dan Manajemen Keuangan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pemerintah daerah

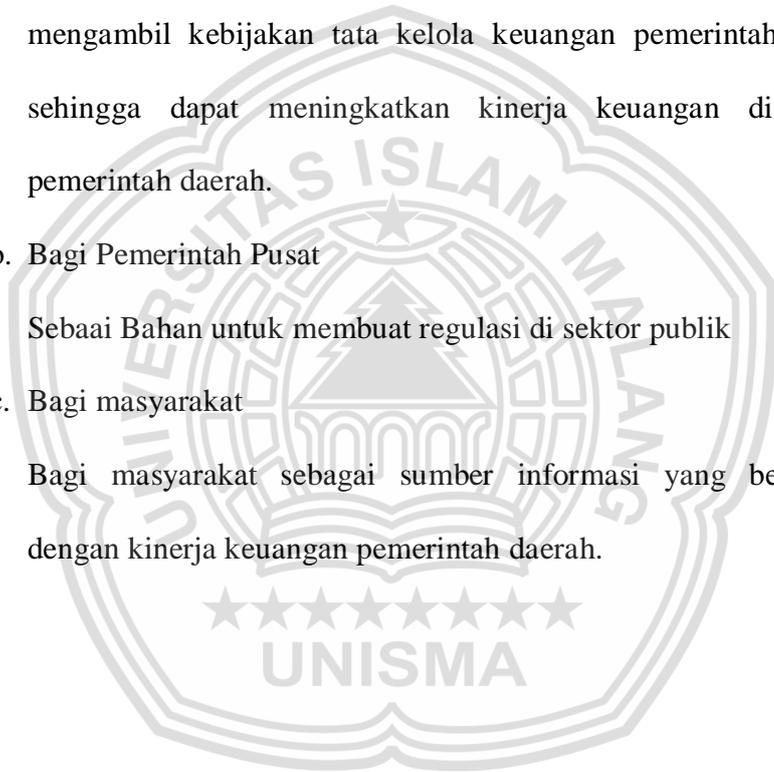
Bagi pemerintah daerah dapat dijadikan sumber referensi dalam mengambil kebijakan tata kelola keuangan pemerintah daerah sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan di dalam pemerintah daerah.

b. Bagi Pemerintah Pusat

Sebagai Bahan untuk membuat regulasi di sektor publik

c. Bagi masyarakat

Bagi masyarakat sebagai sumber informasi yang berkenaan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh dari variabel *Intergovernmental Revenue*, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2017-2020. Setelah melaksanakan analisis data terdapat suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. *Intergovernmental Revenue*, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Hal ini dikarenakan nilai Sig sebesar 0,032 lebih kecil dari 0,05.
2. *Intergovernmental Revenue* berpengaruh signifikan negatif terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Hal ini dikarenakan nilai Sig sebesar 0,009 lebih kecil dari 0,05 dan nilai t -2,635.
3. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan negatif terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Hal ini dikarenakan nilai Sig sebesar 0,038 lebih kecil dari 0,05 dan nilai t -1,185.
4. Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Hal ini dikarenakan nilai Sig sebesar 0,417 lebih besar dari 0,05.

5.2 Keterbatasan

Pada penelitian ini masih memiliki keterbatasan sebagai berikut:

1. Sampel penelitian ini menggunakan pemda kota dan kabupaten di Jawa Timur dan belum keseluruhan pemerintah yang ada di pulau Jawa.
2. Penelitian ini menggunakan 3 variabel independen yaitu *Intergovernmental Revenue*, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal dan kurang menggambarkan Kinerja Keuangan Daerah.
3. Periode pengamatan pada penelitian ini dilakukan selama 4 tahun, sehingga kurang menggambarkan Kinerja Keuangan Daerah secara jangka panjang.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, simpulan serta keterbatasan penelitian, maka terdapat saran yang disampaikan peneliti sebagai berikut:

1. Bagi peneliti berikutnya dapat menambah objek penelitian yaitu kota dan kabupaten di pulau Jawa atau kota dan kabupaten di seluruh Indonesia.
2. Bagi peneliti berikutnya dapat menambahkan variabel independen yang dapat mempengaruhi Kinerja Keuangan Daerah diantaranya Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Pajak Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah.
3. Bagi peneliti berikutnya dapat menambah rentang waktu penelitian, sehingga Kinerja Keuangan Daerah dapat dilihat dari jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad. 2019. *Manajemen Keuangan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah*.
- Andirfa, Mulia, Hasan Basri, and M. Shabr. A. Majid. 2016. "Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Aceh." *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* 9 30—38.
- Antari, Ni Putu Gina Sugma, and Ida Bagus Panji Sadana. 2018. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Tahun 2011-2015)." *E-Jurnal Manajemen Unud* 7(2):1080—1110.
- Astuti, Tutut Dewi, Nuriyadi, Endang Sri Utami, and M. Budiantara. 2017. *Dasar-Dasar Statistik Penelitian*. Yogyakarta: Sibuku Media.
- Dwigantara, M. Putra dan Handayani, Nur. 2021. "Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Intervening". *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi: STIESIA Surabaya*.
- Ernawati, Ni Made Adi, and Putu Riesty Masdiantini. 2016. "Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, Intergovernmental Revenue, Temuan Dan Opini Audit BPK Pada Kinerja Keuangan." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 14(2):1150—82.
- Fadhli, Muhammad, and Rusydi Ananda. 2018. *Statistika Pendidikan Teori Dan Praktik Dalam Pendidikan*. edited by S. Saleh. Medan: Widya Puspita.
- Harto, Puji, and Endri Parwanto. 2017. "Pengaruh Hasil Pemeriksaan BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah." *Diponegoro Journal Of Accounting* 6(1):1—9.
- Janie, Dyah Nirmala Arum. 2012. *Statistik Deskriptif dan Regresi Linier Berganda Dengan SPSS*. Semarang : Semarang University Press

- Lestari, Endri, and Dini Wahjoe Hapsari. 2020. "Pengaruh Belanja Modal , Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dan Opini Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2013-2018)." *E-Proceeding of Management* 7(2):2743–50.
- Mardianis, H. Afrizal, and Enggar. 2017. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Perimbangan, Belanja Daerah Dan Opini Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi."
- Mulyani, Sri, and Hardiyanto Wibowo. 2017. "Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmental revenue Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan (Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2012-2015)." *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 15(1):57–66.
- Nihayah, Ana Zahrotun. 2019. *Pengolahan Data Penelitian Menggunakan Software SPSS 23.0*. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 71 Tahun 2010 Tentang Belanja Modal
- Pratama AB at all. 2022. "Pengaruh Opini Audit BPK, Pendapatan Asli Daerah (PAD) DAN Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Di Jawa Timur Tahun 2017-2019." *E-Proceeding of Management* 11(04):62–76.
- Siyoto, Sandu dan Sodik, Ali. 2015. *Dasar Metode Penelitian*. Edisi Pertama. Literasi Media Publishing: Yogyakarta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 15 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

Undang Undang No. 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 6 Tentang Otonomi Daerah

Zelmiyanti, Riri. 2016. "Riri Zelmiyanti." *Teori, Pendekatan Pada, Keagenan Keuangan, Kinerja Dan, Daerah Studi, Modal Provinsi, Pada Indonesia*, 7(1):11–21.

